

REVIEW MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015- 2019

Instansi : Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

REVIEW MATRIK RENSTRA 2015 – 2019

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	485.520.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI			98%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Yang Tepat Waktu		

		Persentase penurunan sisa perkara	80%		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI			80%	80%	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90% 90%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi			90% 90%	90% 90%	90% 90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			10%	10%	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2,84		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			2,84	2,84	2,84	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
2.	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
		Persentase perkara mediasi yang	10%		b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil			5%	5%	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan		

		dinyatakan berhasil									Umum			
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
3.	Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.950.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan			NIHIL	NIHIL	NIHIL	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	NIHIL (TIDAK MEMPUNYAI ZETTING PLAAT)

	kepuasannya terpenuhi											Diluar Gedung Pengadilan		
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)			100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	72.000.000
4.	Meningkatkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			30%	30%	30%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Perkara perdata tidak dibiayai negara

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 30 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

NIP. 19611111982031013